PERANAN HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) SEBAGAI NON-GOVERMENTAL ORGANIZATION (NGO) DALAM MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGNYA DI MYANMAR

Athalia Dianti Roring¹, Bela Puji Utami², Reyhan Ramadhan³, Noer Apptika Fujilestari⁴
athalia.dnta@gmail.com¹, belapuji785@gmail.com², reyhanramadhan89216@gmail.com³,
noer.apptika@lecture.unjani.ac.id⁴
Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Etnis Rohingya, minoritas Muslim yang telah lama menetap di Myanmar, menghadapi diskriminasi sistematis, termasuk penghapusan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Kondisi ini memunculkan pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup kekerasan fisik, pemerkosaan, dan pengusiran paksa, yang sering kali digambarkan sebagai pembersihan etnis. Human Rights Watch (HRW), sebuah organisasi non-pemerintah internasional, memainkan peran penting dalam mengatasi krisis ini. HRW menjalankan peran mikro dengan mendistribusikan bantuan langsung kepada korban dan mendokumentasikan pelanggaran HAM, serta peran makro melalui advokasi kebijakan internasional, penyebaran informasi terpercaya, dan pembentukan koalisi dengan organisasi lain. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kontribusi HRW dalam mengatasi krisis Rohingya, dengan fokus pada bagaimana strategi mikro dan makro mereka mendukung solusi sistematis dan global terhadap krisis kemanusiaan ini.

Kata Kunci: Human Right Watch (HRW), Non – Governmental Organization (NGO), Kemanusiaan, Myanmar.

ABSTRACT

The Rohingya, a long-settled Muslim minority in Myanmar, face systematic discrimination, including deprivation of citizenship under Myanmar's 1982 Citizenship Law. This has led to human rights violations that include physical violence, rape, and forced displacement, often described as ethnic cleansing. Human Rights Watch (HRW), an international non-governmental organization, plays a critical role in addressing this crisis. HRW plays a micro role by distributing aid directly to victims and documenting human rights violations, as well as a macro role through international policy advocacy, dissemination of reliable information, and coalition building with other organizations. This study uses a qualitative approach to analyze HRW's contribution to addressing the Rohingya crisis, focusing on how their micro and macro strategies support systematic and global solutions to this humanitarian crisis.

Keywords: Human Right Watch (HRW), Non – Governmental Organization (NGO), Humanity, Myanmar.

PENDAHULUAN

Sejak Myanmar merdeka pada tahun 1948, Rohingya, yang merupakan minoritas Muslim, telah mengalami tindakan diskriminasi. Istilah “Rohingya” berasal dari kata “Rohang”, yang pada masa lalu merupakan sebutan untuk “Arakan” (sekarang Rakhine), dan penduduk di wilayah tersebut disebut “Rohingya” (Matthew, 2020). Pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi oleh Rohingya di Myanmar terus berulang dan telah menjadi krisis kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia internasional. Sejak disahkannya Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982, etnis Rohingya tidak lagi dianggap sebagai bagian dari kewarganegaraan Myanmar dan dianggap sebagai orang asing (stateless).

Situasi ini terus berlanjut hingga Presiden Thein Sein menjabat pada tahun 2011. Thein Sein bahkan menerapkan kebijakan yang menolak status kewarganegaraan Rohingya di Myanmar. Rohingya dianggap sebagai “orang Bengali ilegal” (kelompok etnis dari Bangladesh yang dianggap masuk ke Myanmar secara ilegal). Penolakan kewarganegaraan Rohingya sebagai bagian dari Myanmar tercermin dari pernyataan Sein bahwa: “Rohingya bukan warga negara kami dan kami tidak memiliki kewajiban untuk melindungi mereka”. (Albayumi et al., 2018)

Banyaknya etnis Rohingya yang mengungsi ke negara tetangga karena etnis Rohingya didiskriminasi oleh pemerintah Myanmar sendiri. Konflik ini masih menjadi konflik internasional hingga saat ini. Banyak ahli yang menyimpulkan bahwa konflik ini terjadi antara dua kelompok minoritas, yaitu kelompok Buddha dan Rohingya, yang saling bermusuhan di Rakhine. Secara umum, kekerasan dipicu oleh penipuan dan pembunuhan terhadap wanita Buddha oleh wanita Muslim, yang kemudian ditambah dengan pembunuhan terhadap sepuluh wanita Muslim (Rameliah & Sagena, 2023). Penderitaan yang dialami etnis imbas upayanya meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan. Pada awalnya harapan untuk mengubah hidup lebih baik diandalkan para pengungsi, sebagaimana dialami etnis Rohingya dan warga Bangladesh. Mereka bersedia membayar uang agar bisa meninggalkan negaranya, meski diselundupkan oleh oknum. Lebih dari 100.000 orang Rohingya di Myanmar masih tinggal di kamp-kamp pengungsi internal dan dilarang meninggalkan kamp tersebut oleh pihak berwenang setempat. Perhatian internasional terhadap Rohingya mulai mencuat setelah kerusuhan yang terjadi di negara bagian Rakhine pada tahun 2012. Kemudian, pada tahun 2015, krisis pengungsi Rohingya kembali menarik perhatian dunia, ketika banyak dari mereka berisiko melakukan perjalanan laut yang berbahaya untuk melarikan diri, dengan Malaysia dan Indonesia menjadi tujuan utama mereka (Putu et al., 2019).

Ratusan minoritas Rohingya telah mengalami ketidakadilan, kerusakan fisik serta Mental. Dalam kekerasan yang terjadi pada tahun 2012 silam, 140.000 pengungsi Rohingya telah dipaksa keluar dari rumah mereka. Selain itu, terjadi pembatasan terhadap etnis Rohingya dalam hal pekerjaan dan kebebasan beragama. Kasus yang terjadi cukup lama ini dalam penelitian (Ula, 2017) menyebutkan bahwa serangan tahun 2012 tersebut juga dianggap sebagai bentuk tindakan pembersihan etnis, karena banyaknya korban jiwa berada di pihak etnis Rohingnya. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya digambarkan sebagai kejahatan kemanusiaan. Pelanggaran HAM yang terjadi di kalangan etnis Rohingya. Populasi Muslim Rohingya dapat digambarkan sebagai populasi yang parah dan sistematis. Situasi ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa tindakan HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah melanggar hukum internasional dan disebut sebagai diskriminasi etnis.

Kehidupan Rohingya tidak mencerminkan kehidupan yang bermartabat, atas kondisi tersebut dibangunlah kamp-kamp. Mereka tinggal di kamp-kamp yang sempit dan penuh sesak, tidak memiliki akses untuk berolahraga, makanan dan air minum yang bersih sangat sulit didapat. Diskriminasi yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Rohingya dapat dikatakan sebagai konflik sosial dan bentuk pembersihan etnis. Bagi pemerintah Myanmar, Rohingya dianggap sebagai penduduk ilegal dari Bangladesh yang datang ke Myanmar dan oleh karena itu didiskriminasi oleh pemerintah dan penduduk setempat. Perlakuan ini telah menjadi penyebab utama dari krisis kemanusiaan. Dalam (Catur & Rahayu, 2020) hal tersebutlah yang kemudian mengundang respon dari masyarakat internasional yang memiliki kekhawatiran akan meluasnya dampak krisis kemanusiaan dari tahun-tahun sebelumnya. Respon tersebut membuat adanya beberapa peran dari organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan atau hak asasi manusia

untuk tidak tinggal diam salah satunya adalah Human Right Watch

Tidak diterimanya etnis ini oleh pemerintah Myanmar membuat status pengungsi Rohingya menjadi masalah yang menarik perhatian dunia internasional. Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya telah menarik perhatian komunitas internasional. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab terhadap nasib dari etnis rohingya, dimana aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar secara tidak langsung sudah mendekati praktek genocide (Rosyid, 2019). Dengan ini, aktor non-negara yang terlibat dalam bidang kemanusiaan, seperti Human Right Watch (WRH). Human Rights Watch itu sendiri merupakan suatu organisasi non-pemerintah untuk menyelidiki dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi diseluruh penjuru dunia. Peran aktor hubungan internasional khususnya NGO (Non-Governmental Organization) internasional. Human Rights Watch (HRW) sebagai salah satu INGO yang peduli dengan penegakan hak asasi manusia, hadir di Myanmar untuk membantu korban Rohingya pasca konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Dalam melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar sebagai aktor non - negara HRW hadir untuk membantu etnis Rohingya yang telah mengalami diskriminasi.

Melihat banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, Human Rights Watch (HRW), sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional, ikut terlibat dalam upaya menangani kasus ini. HRW berusaha untuk meningkatkan kesadaran internasional akan krisis Rohingya dengan mengadvokasi negara-negara lain dan lembaga-lembaga internasional untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. HRW mengumpulkan kesaksian dari para pengungsi dan korban pelanggaran hak asasi manusia, yang kemudian digunakan untuk mendokumentasikan pelanggaran dan memberikan suara kepada mereka yang tidak didengar. HRW berusaha untuk mempromosikan solidaritas internasional, menggalang dukungan untuk Rohingya dan meningkatkan kesadaran akan penderitaan mereka.

Human Rights Watch atau yang disingkat sebagai HRW saat menangani krisis yang terjadi di Myanmar lebih tepatnya yang dialami oleh etnis Rohingya,. Kemudian dalam hal ini penulis menggunakan teori menurut Karsidi dalam (Almeyda. P. N, 2022.) bahwa Human Rights Watch dalam menangani krisis kemanusiaan Rohingnya memiliki dua peran, yaitu:

1. Peran mikro
2. Peran makro dimana peran HRW pada peran makro meliputi:
 - a. Menyediakan informasi-informasi penting
 - b. Mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia untuk berempati
 - c. Bekerjasama dengan organisasi lain

Dengan penjabaran dan identifikasi dari kasus tersebut, penulis bermaksud untuk menjadikan studi kasus pada krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal ini untuk memberikan pemahaman bagaimanakah peran Human Right Watch (HRW) sebagai salah satu NGO (Non-Governmental Organization). Maka sesuai dengan paparan serta adanya permasalahan diatas, penulis berfokus pada bagaimana peran dari aktor non pemerintah yang memainkan perannya. Maka Penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul penelitian “Peranan Human Rights Watch (HRW) Sebagai Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Rohingnya di Myanmar”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta mengkompilasi berbagai sumber literatur atau literature review dari berbagai jurnal maupun sumber data. Bertujuan untuk mempelajari Peranan Human Rights Watch (HRW)

Sebagai Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Menangani Krisis Kemanusiaan Rohingnya di Myanmar. Penelitian ini merujuk pada beberapa jurnal akademik, opini dan pandangan para ahli yang kompeten, juga data statistik yang dipublikasi oleh otoritas terkait maupun laporan survei dari berbagai lembaga kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Krisis Kemanusiaan yang dialami Etnis Rohingya

Etnis Rohingya, kelompok minoritas Muslim yang telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, menghadapi diskriminasi sistemik sejak negara tersebut merdeka pada tahun 1948. Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara, melainkan menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, sehingga mereka menjadi kelompok tanpa kewarganegaraan (stateless). Kebijakan kewarganegaraan tahun 1982 secara resmi mengecualikan Rohingya dari status kewarganegaraan, mengakibatkan mereka kehilangan hak-hak dasar seperti pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan hukum.

Kekerasan terhadap Rohingya telah terjadi secara berulang, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, pembakaran rumah, dan pengusiran paksa. Sebagai contoh, pada tahun 2017, dalam waktu satu bulan, 123.000 orang Rohingya terpaksa mengungsi akibat operasi militer yang brutal. Banyak di antara mereka melarikan diri ke Bangladesh dan negara-negara tetangga seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Gelombang pengungsian ini menimbulkan krisis kemanusiaan global yang menarik perhatian masyarakat internasional.

Human Rights Watch dalam menanggapi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar

Human Rights Watch berperan signifikan dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar, melalui pendekatan Transnational Advocacy Network. Berdasarkan konsep ini, HRW mengimplementasikan beberapa strategi utama, seperti "information politics," "symbolic politics," "leverage politics," dan "accountability politics," yang dirancang untuk mendorong perubahan dan memperjuangkan hak asasi manusia bagi minoritas Rohingya yang mengalami diskriminasi dan kekerasan.

Salah satu pendekatan utama yang diambil HRW adalah "information politics," di mana organisasi ini secara aktif mengumpulkan, menyelidiki, dan menyebarkan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar. Dengan mendokumentasikan kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh Rohingya, HRW berhasil menarik perhatian internasional dan memobilisasi dukungan untuk isu ini. Selain melalui laporan resmi, HRW menggunakan berbagai platform media, termasuk media sosial, untuk menyebarkan informasi mengenai kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah dan militer Myanmar.

Selain itu, HRW menerapkan "symbolic politics," yaitu menggunakan simbol dan aksi yang menggugah emosi publik untuk membangun simpati internasional terhadap penderitaan Rohingya. HRW menggunakan gambar, video, dan cerita yang mendalam mengenai penderitaan korban untuk menyampaikan pesan hak asasi manusia yang universal. Simbol-simbol ini membantu membangun dukungan dari masyarakat internasional yang peduli pada keadilan sosial dan HAM.

Namun, dalam upaya leverage politics dan accountability politics, HRW menghadapi tantangan yang signifikan. Sebagai organisasi independen, HRW terbatas dalam menekan pemerintah Myanmar secara langsung, karena Myanmar bersikap defensif terhadap campur tangan internasional dan tidak menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak-hak kewarganegaraan etnis Rohingya. Meskipun HRW telah berupaya mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan negara-negara anggota untuk membentuk investigasi independen

terhadap pelanggaran yang terjadi, pemerintah Myanmar tetap tidak responsif terhadap tekanan ini.

Keterbatasan dalam leverage dan accountability politics mencerminkan kendala besar yang dihadapi HRW sebagai organisasi non-pemerintah dalam mengubah kebijakan negara. Pemerintah Myanmar secara aktif mempropagandakan isu Rohingya sebagai masalah domestik yang tidak boleh dicampuri, sehingga HRW kesulitan mengawasi implementasi kebijakan yang dijanjikan pemerintah. Meskipun begitu, peran HRW dalam menarik perhatian internasional tetap penting dalam memastikan bahwa penderitaan Rohingya tidak terabaikan oleh masyarakat global.

HRW memiliki kontribusi penting dalam advokasi dan peningkatan kesadaran internasional terkait krisis kemanusiaan di Myanmar. Namun, tantangan diplomatik dan penolakan Myanmar terhadap intervensi eksternal menegaskan perlunya dukungan dari aktor internasional lain agar HRW dapat menjalankan perannya secara lebih efektif.

Peran Human Rights Watch berdasarkan Mikro dan Makro dalam menangani Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar

Peran Mikro

Pada peran Mikro, Human Rights Watch memiliki peran penting dalam menangani krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Sebagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada hak asasi manusia, HRW mengambil langkah-langkah strategis pada tingkat mikro untuk mendukung korban krisis ini. Peran mikro mereka melibatkan tindakan-tindakan langsung yang bersifat operasional, baik dalam bentuk penyediaan bantuan kemanusiaan maupun interaksi personal dengan para korban.

1. Penyediaan Bantuan Kemanusiaan

HRW memastikan distribusi bantuan kemanusiaan, seperti makanan, obat-obatan, tenda, dan kebutuhan dasar lainnya, dapat mencapai para korban di wilayah konflik dan kamp pengungsi. Kerja sama HRW dengan organisasi internasional seperti ASEAN dan PBB sangat penting dalam menekan pemerintah Myanmar untuk mengizinkan akses bantuan ke wilayah Rohingya. Misalnya, pada 14 Oktober 2017, HRW berperan dalam menyerahkan bantuan yang berasal dari negara-negara ASEAN kepada para korban, termasuk tenda, perlengkapan keluarga, peralatan kebersihan, dan generator listrik.

Selain itu, HRW juga bekerja untuk menjangkau lebih dari 270.000 pengungsi Rohingya di Bangladesh, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi meskipun menghadapi hambatan seperti pemblokiran bantuan oleh pemerintah Myanmar. Peran ini menunjukkan bagaimana HRW menjadi penghubung antara korban krisis dan komunitas internasional yang memberikan bantuan.

2. Pendekatan Personal terhadap Korban

HRW menjalankan peran mikro lainnya melalui pendekatan personal kepada korban. Organisasi ini bertindak sebagai wadah bagi para korban untuk menceritakan pengalaman mereka, khususnya terkait kekerasan dan pelanggaran HAM yang mereka alami. Banyak korban yang awalnya takut berbicara, namun melalui pendekatan HRW, mereka merasa didengar dan dipahami. Pengumpulan informasi dari korban ini memberikan HRW data penting yang dapat digunakan untuk memperkuat laporan mereka kepada komunitas internasional.

Pendekatan personal ini bukan hanya membantu korban secara psikologis, tetapi juga memungkinkan HRW untuk mendokumentasikan fakta-fakta penting tentang kejahatan yang terjadi. Informasi ini menjadi dasar bagi langkah-langkah advokasi dan kampanye global yang dilakukan HRW untuk menarik perhatian terhadap krisis Rohingya.

Peran Makro

Human Rights Watch, sebagai organisasi internasional yang berfokus pada hak asasi

manusia, memainkan peran strategis di tingkat makro dalam menangani krisis Rohingya. Peran ini untuk menciptakan tekanan terhadap pemerintah Myanmar dan meningkatkan kesadaran dunia tentang tragedi ini. Berikut adalah uraian mengenai peran makro HRW dalam krisis kemanusiaan ini.

1. Menyediakan Informasi-Informasi Penting

HRW bertindak sebagai penyedia informasi terpercaya mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya. Informasi ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis citra satelit, dan dokumen resmi. HRW mengungkap fakta-fakta seperti kekerasan militer Myanmar, pembakaran desa, pemerkosaan massal, dan pengusiran lebih dari 700.000 orang ke Bangladesh. Data ini digunakan untuk mendukung advokasi dan memberikan dasar bagi kebijakan global yang menekan pemerintah Myanmar untuk bertanggung jawab.

2. Mempengaruhi Masyarakat di Seluruh Dunia untuk Berempati

HRW memanfaatkan media sosial, laporan publik, dan kampanye visual untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global. Dengan membagikan gambar, kutipan, dan laporan langsung dari lapangan, HRW berhasil menarik perhatian masyarakat dunia. Hal ini mendorong solidaritas global, seperti demonstrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mendukung hak-hak Rohingya. Dukungan masyarakat dunia memberikan tekanan moral pada pemerintah Myanmar dan aktor internasional untuk segera menangani krisis tersebut.

3. Bekerjasama dengan Organisasi Lain

HRW membangun koalisi dengan lebih dari 95 organisasi internasional, termasuk PBB, ASEAN, dan CEDAW, untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah Myanmar. Dalam kolaborasi ini, HRW mendesak investigasi independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine, menerapkan embargo senjata, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Selain itu, HRW mengadvokasi perubahan kebijakan, seperti amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 untuk menghapus diskriminasi terhadap etnis Rohingya.

Peran Mikro dan Makro

Peran Mikro HRW sangat penting dalam menangani krisis Rohingya. Dengan memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada korban dan mendokumentasikan pengalaman mereka, HRW tidak hanya meringankan penderitaan langsung tetapi juga memberikan dasar bagi upaya penyelesaian jangka panjang. Tindakan ini memperkuat kepercayaan masyarakat global terhadap peran HRW sebagai penjaga hak asasi manusia.

Melalui langkah-langkah ini, HRW membuktikan bahwa meskipun beroperasi dalam ruang lingkup mikro, dampaknya dapat dirasakan hingga ke tingkat global. Peran mikro ini merupakan elemen mendasar dalam misi mereka untuk melindungi hak-hak korban dan menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Myanmar.

Peran Makro HRW bertujuan untuk menciptakan perubahan sistemik yang berdampak jangka panjang. Dengan mengadvokasi kebijakan global, membangun koalisi, dan menyampaikan informasi yang valid, HRW berhasil menekan pemerintah Myanmar dan komunitas internasional untuk bertanggung jawab atas krisis Rohingya. Peran ini menunjukkan bagaimana organisasi non-pemerintah dapat berfungsi sebagai kekuatan transformasional dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan. Melalui strategi makro ini, HRW tidak hanya menjadi pelapor atas tragedi kemanusiaan, tetapi juga penggerak utama untuk perubahan global dalam menangani isu-isu hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu tragedi hak asasi manusia terburuk di abad ini. Diskriminasi sistematis, kekerasan, dan pengusiran paksa telah menjadikan Rohingya sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan. Human Rights Watch (HRW) memainkan peran penting dalam mengatasi situasi ini melalui pendekatan mikro dan makro.

Pada tingkat mikro, HRW menyediakan bantuan kemanusiaan langsung, seperti distribusi makanan, obat-obatan, dan tenda bagi para korban yang terlantar. Pendekatan personal terhadap korban membantu mengumpulkan data mendalam mengenai pelanggaran HAM yang terjadi, yang kemudian digunakan untuk memperkuat laporan internasional.

Di tingkat makro, HRW berfokus pada advokasi global dengan menyediakan informasi valid tentang pelanggaran HAM, memobilisasi simpati masyarakat internasional melalui kampanye media, dan bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Myanmar dan mengadvokasi perubahan kebijakan yang melindungi hak-hak Rohingya.

Meskipun menghadapi tantangan besar, seperti resistensi pemerintah Myanmar terhadap intervensi eksternal, kontribusi HRW tetap signifikan dalam menarik perhatian global terhadap penderitaan Rohingya. Strategi mereka menunjukkan pentingnya peran aktor non-negara dalam menyelesaikan konflik kemanusiaan secara global. Namun, untuk keberhasilan jangka panjang, diperlukan dukungan lebih besar dari komunitas internasional, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun kebijakan yang lebih tegas terhadap Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- Albayumi, F., Hadi, N. M., & Susilo, D. (2018). Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Krisis Pengungsi Rohingya Tahun 2017. In *Nation State: Journal of International Studies* (Vol. 1, Issue 1).
- Almeyda Putri Nadya. (2022.). PERAN HUMAN RIGHTS WATCH DALAM MENANGANI KRISIS ROHINGYA DI MYANMAR.
- Catur, D., & Rahayu, P. (2020). PERAN AKTOR NON-NEGARA HUMAN RIGHTS WATCH (HRW) STUDI KASUS ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR SEBAGAI BAHAN AJAR BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING. *Ed-Humanistics*, 05(01), 658.
- Matthew, G. (2020). Kepentingan Nasional dan Diplomasi ala Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya di Myanmar. In *Jurnal Hubungan Internasional* □ Tahun XIII (Issue 1).
- Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum*, Vol.21(1). <https://id.wikipedia.org/wiki/Rohingya>,
- Rameliah, D. R., & Sagen, U. W. (2023). Krisis Keamanan Manusia Di Myanmar dan Penerapan Konsep Responsibility to Protect. 27980–27981. www.quora.com
- Rosyid, Moh. (2019). PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 613. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2190>
- Ula, S. (2017). Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar. In *Journal of International Relations* (Vol. 3, Issue 3). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihiWebsite:http://www.fisip.undip.ac.id>.